

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Profil perusahaan

Wahana Lingkungan Hidup atau lebih dikenal dengan singkatan Walhi awalnya digagas oleh Emil Salim ketika itu juga mengemban jabatan Menteri lingkungan hidup. Diawali dari keinginan belajar tentang lingkungan hidup oleh Emil Salim kemudian menggandeng banyak berbagai organisasi yang berfokus dengan isu lingkungan hidup untuk membentuk organisasi bersama dan menjadi forum komunikasi dengan bentuk yang independen bukan *underbow* dari partai politik atau organisasi lain. Setelah beberapa kali melakukan komunikasi akhirnya terbentuklah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pada 15 Oktober 1980.

Dalam gerakannya Walhi bergerak sebagai LSM yang terus menyuarakan isu lingkungan hidup dan berikut adalah visi misi dari Walhi :

Visi

Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Misi

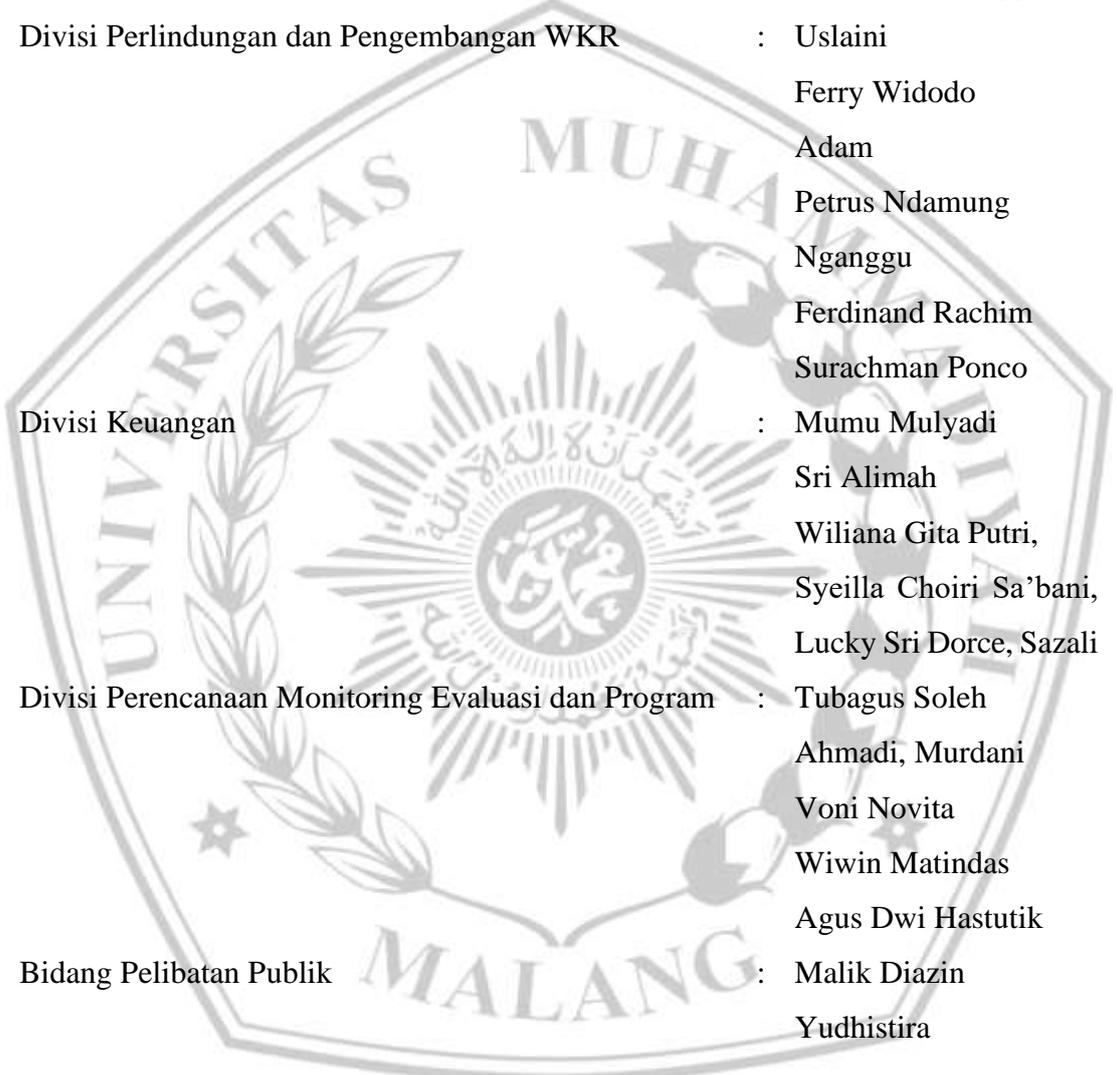
1. Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
2. Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat
3. Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan
4. Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru
5. Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan

Saat ini walhi dalam melebarkan sayap kampanye menyuarakan pentingnya penjagaan lingkungan hidup dan keadilan hak rakyat. Walhi mulai merambah ke dunia internet yang saat ini telah membuat portal media walhi.or.id, chanel youtube dan media sosial seperti intragram dan twitter. Media milik walhi tersebut juga selalu *update* memberitakan terkait isu lingkungan hidup yang saat ini portal media online walhi.or.id memiliki sembilan rubrik yang beragam. Saat ini walhi semakin terbuka kepada seluruh masyarakat untuk menjadi anggota maupun menjadi donator dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh walhi.

4.1.2 Struktur organisasi



Direktur	:	Zenzi Suhadi
Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan	:	Ronald Siahaan Nur Wahid Satrio Melva Harahap
Divisi Kampanye (Anti) Industri Ekstraktif	:	Puspa Dewi Uli Arta Siagian Parid Ridwanuddin Dwi Sawung Fanny Tri Jambore Christanto, Abdul Ghofar
Divisi Penguatan Kelembagaan	:	Hadi Jatmiko Yudhi Rasjid Haini Mortirani Fatimah Smith Neng Mirawati, Triyanto Suharno



	Aslan
	M Yasin
	Mulyadi
	Kusno
	Dalil Dwi Phangga
Divisi Perlindungan dan Pengembangan WKR	: Uslaini
	Ferry Widodo
	Adam
	Petrus Ndamung
	Nganggu
	Ferdinand Rachim
	Surachman Ponco
Divisi Keuangan	: Mumu Mulyadi
	Sri Alimah
	Wiliana Gita Putri,
	Syeilla Choiri Sa'bani,
	Lucky Sri Dorce, Sazali
Divisi Perencanaan Monitoring Evaluasi dan Program	: Tubagus Soleh
	Ahmadi, Murdani
	Voni Novita
	Wiwin Matindas
	Agus Dwi Hastutik
Bidang Pelibatan Publik	: Malik Diazin
	Yudhistira

4.2 Logo



4.3 Konologi Kasus

Emil salim selaku pendiri walhi memiliki karir telah beberapa kali menduduki kursi kementrian selama rezim Soeharto berlangsung. Jabatannya yakni

- Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara
- Menteri Perhubungan
- Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Walhi didirikan saat Emil mengemban jabatan sebagai Menteri Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1978-1983). Mulai dari itu, Emil Salim berkonsultasi dengan rekannya Bedjo Rahardjo, Erna Witoelar, Ir. Rio Rahwartono (LIPI), dan Tjokropranolo (gubernur DKI) untuk membentuk organisasi yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup. Diskusi yang dilakukan Emil dengan rekan-rekannya tidak lain sebagai usaha untuk memperjuangkan isu lingkungan di Indonesia karena dia menyadari bahwa ini adalah bidang yang masih baru dan belum populer di negaranya. Dia memiliki keinginan kuat untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat agar dia dapat mengetahui masalah-masalah lingkungan yang dihadapi dan mencari solusi bersama-sama. Untuk mewujudkan tujuannya ini, dia perlu menemukan

cara agar kesadaran mengenai isu lingkungan ini dapat menyebar luas di masyarakat dan menjadi perhatian utama yang membawa perubahan positif.

Hasil dari diskusi tersebut akhirnya Emil Salim menghubungi beberapa organisasi *Non Governmental Organization* (NGO) untuk memperkuat gerakan yang akan dibangun. Diadakanlah pertemuan pertama bersama *Non Governmental Organization* (NGO) bertempat di lantai tiga belas kantor Gubernur DKI Jakarta. Tidak ada yang memperkirakan ternyata begitu banyak organisasi yang hadir berkisar tiga ratus Lembaga dalam ruangan tersebut. Dari banyak organisasi yang datang ada sepuluh organisasi yang dipilih untuk membantu program pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Berawal dari sepuluh organisasi yang sepenuhnya memberikan dukungan diantaranya YIH dipimpin Dr Fred Hehuwed, BCS dipimpin oleh Dedy Darnaedi, Gelanggang Remaja Bulungan dipimpin oleh Bedjo Raharjo, PPT dipimpin oleh Ny. Mudiati Jalil, Grup Wartawan Iptek yang dipimpin oleh Soegiarto PS, Kwarnas Gerakan Pramuka oleh Drs. Poernomo, Sekolah Tinggi Publisistik, IALI dipimpin Ir. Zein Rachman, PBI dipimpin H. Kamil Oesman, HUKLI oleh George Adjidjondro, dan Srutamandala. Kelompok ini juga sudah cukup aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan salah satunya di Jakarta diselenggarakan seminar mengenai risiko Merkuri (Hg) dan pencemaran Teluk Jakarta. Seminar ini menghadirkan Profesor Harada dari Negara Jepang sebagai salah satu pembicara utamanya. Dr. Meizer, seorang dokter yang ikut serta dalam pengamatan bersama kelompok sepuluh pada acara tersebut, membantu meningkatkan kesadaran akan dampak serius dari permasalahan tersebut. Respons terhadap seminar ini sangat beragam, melibatkan Komisi X DPR, Menteri Negara PPLH, Pemda DKI, dan beberapa dokter yang turut serta dalam diskusi tersebut.

Setelah adanya kelompok sepuluh ini ada keinginan untuk mengumpulkan lebih banyak NGO. Sri Sultan Hamengku Buwono IX melalui Lembaga yang dimilikinya Indonesia Wildlife Fund memberikan dukungan untuk adanya konferensi pusat studi lingkungan. Dalam pertemuan tersebut beberapa *Non Governmental Organization* (NGO) sempat mengira akan dibentuknya organisasi payung di bidang

lingkungan yang akan diarahkan pemerintah seperti adanya pembentukan KNPI, tetapi dalam hal ini tujuannya berbeda, karena organisasi dibentuk bersama ornop yang bergerak di bidang lingkungan hidup tidak berafiliasi dengan pemerintah dan dalam pertemuan tersebut disepakatilah nama Walhi pada 15 Oktober 1980. Karena bukan afiliasi pemerintah dan bukan *underbow* dari organisasi apapun meski Emil Salim saat itu sebagai Menteri negara tetapi Walhi memutuskan menjaga jarak dan tidak membantu Emil sebagai staf di kementerian. Walhi terus bertumbuh dan dapat mengadakan pertemuan nasional lingkungan hidup (PNLH) sebagai forum musyawarahnya. Dalam PNLH II Walhi menyadari bahwa kerusakan lingkungan berakar pada birokrasi dan kebijakan pemerintah. Oleh karenanya tidak mungkin untuk membedakan masalah lingkungan hidup dari pengetukan palu yang dilakukan oleh pemerintahan.

Dari kesadaran tersebut Walhi bertindak sebagai oposan dan memulai advokasi-advokasi yang tidak jarang berhadapan langsung dengan pemerintahan. Beberapa diantaranya di awal gerakan walhi memberikan gugatan kepada pejabat negara karena memberikan izin pembangunan pabrik pulp dan rayon, PT Inti Indorayon Utama di Porsea (1989) yang berjumlah enam orang. Tahun sebelumnya walhi juga menggugat Amdal PT Inti Indrayon Utama. Hingga saat ini gerakan Walhi juga masih konsisten dengan tetap menjadi oposisi dengan menjaga kelestarian lingkungan dari sudut pandang kebijakan politis dan membela masyarakat yang tertindas oleh sistem karena rusaknya lingkungan yang mereka miliki.

Saat ini walhi melebarkan sayap seluas luasnya untuk memperkuat gerakan melestarikan lingkungan hidup. Terbahas ketika PNLH ke-VIII yang bertempat di Parapat, Sumatera Utara diputuskan bahwa WALHI harus memperbaiki dirinya sendiri karena perjuangan yang sangat berat di depan untuk tetap pada ranah gerak walhi dalam menjaga lingkungan hidup tetap dalam kelestarian. tentunya juga perbedaan dinamika permasalahan di setiap waktu yang selalu berbeda. Ini adalah hasil dari hegemoni liberalisme baru yang disebut globalisasi semakin kuat. Kedua, Walhi melihat adanya peningkatan dukungan dan kecondongan keberpihakan

kekuatan politik yang berkuasa di dalam negeri terhadap kepentingan ekonomi global yang belum tentu dampaknya baik terhadap kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan dua hal di atas yang akan menjadi tantangan untuk gerak pelestarian lingkungan hidup, walhi menyadari bahwa tidak bisa sendirian melainkan butuh dukungan yang besar dari seluruh unsur. Untuk itu walhi semakin terbuka bagi lapisan masyarakat untuk berbarengan bisa ikut serta dalam proses pelestarian lingkungan.

Walhi mengundang semua orang untuk berpartisipasi secara aktif, bisa berpartisipasi dengan menjadi anggota atau dengan menyumbangkan dana untuk aktivitas penyelamatan lingkungan. Dengan ini walhi memiliki kekuatan yang lebih besar dalam gerakannya dan walhi bukan hanya milik kelompok yang tergabung tetapi walhi sudah menyatu dengan publik dan menjadi milik semua masyarakat. Secara berbarengan masyarakat menjadi basis utama kekuatan untuk melemahkan ancaman yang datang baik dari internal maupun eksternal. Untuk mempermudah donasi walhi juga memberikan *link* untuk berdonasi di website walhi.or.id.